

Dampak Arms Military Build-Up Tiongkok Terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara Aliansi Amerika Serikat Di Kawasan Asia Pasifik Periode 2012-2017

Sahistya Dhanesworo¹

Fahlesa Munabari²

Abstract

This study aims to analyze the implications of China's Arms Military Build-Up on security stability in Asia Pacific. To analyzing the case, the author use several concepts such as, Deterrence, Arms Build-Up, and Action-Reaction Model. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that China now become emerging power in the East Asia region with such rapid economic growth, which is has an impact on increasing military capability that the increase bring in reaction from The U.S. alliance countries within Asia Pacific region (Japan, Korea South, Taiwan) and The United States themselves.

Keywords: *arms military build-up, Asia Pacific, China, military*

Pendahuluan

Salah satu isu tradisional dalam hubungan internasional yaitu, keamanan merupakan salah satu isu yang tidak dapat dikesampingkan. Negara merupakan objek pengamanan di dalam konteks pertahanan dan keamanan militer. Maka langkah yang ditempuh oleh suatu negara adalah dengan melaksanakan peningkatan kapabilitas militer baik secara kualitas, maupun kuantitas persenjataan (Arms Military Build-Up) dan pelaksanaan tersebut berkaitan dengan perekonomian suatu negara dan ancaman yang dihadapi. Arms Military Build-Up sendiri memiliki satu bagian yang menjadi turunan, yaitu RMA (Revolution in Military Affairs) yang membahas mengenai revolusi dalam bidang militer (Thompson, 2000: 72).

Perubahan RMA tidak hanya mencakup peningkatan secara kuantitas dan kualitas. Namun juga perubahan sebuah pola atau cara dalam perkembangan militer, seperti doktrin atau strategi pertahanan atau hal lainnya. RMA sendiri baru muncul pada era perang

¹ Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, dsahistya@gmail.com

² Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur.

dingin di Uni Soviet. Dimana pada masa itu pemerintah Uni Soviet menerapkan revolusi militer dengan meningkatkan kapabilitasnya dengan melakukan pembaruan teknologi senjata konvensional (Chapman, 2003:2). Hal tersebut akhirnya menyebar sampai ke Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat lebih memfokuskan RMA-nya pada teknologi komputer. Meskipun telah dicetuskan sejak lama, namun hasil dari RMA Amerika Serikat baru diuji coba dalam pertempuran nyata pada tahun 1991-2003 yakni saat Amerika Serikat menginvasi Irak. Hal ini dilakukan Amerika Serikat dengan tujuan untuk menunjukkan kepada negara di dunia bahwa Amerika Serikat merupakan kiblat dari strategi dan teknologi militer (Thompson, 2000:3). Pada akhirnya telah berhasil membuat negara di dunia terpengaruh dan menyadari bahwa modernisasi dalam bidang militer merupakan hal yang penting.

Salah satu negara yang terpengaruh adalah Tiongkok, selain karena adanya invansi yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Irak. Faktor historis dimana Tiongkok pernah menjadi korban penjajahan oleh Jepang juga mendorong Tiongkok untuk melakukan modernisasi militer. Karena, hal tersebut telah membuat Tiongkok tidak memiliki political trust terhadap negara-negara tetangganya. Ditambah dengan keadaan ekonomi Tiongkok yang semakin membaik juga membuat Tiongkok berusaha melakukan modernisasi militer. Pada tahun 1993, pemerintah Tiongkok mengeluarkan panduan strategis baru bagi militer Tiongkok, yaitu *Jūnshì Zhànlüè Fāngzhēn* atau Pendekatan Strategis Militer (Chase, 2015: 14). Melalui doktrin ini, pemerintah Tiongkok memproyeksikan pembangunan militer besar-besaran. Ditambah dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis Selat Taiwan pada 1995-1996 semakin menguatkan Tiongkok untuk memperkuat militernya. Pada 1999, Tiongkok semakin gencar melakukan peningkatan militer untuk mengimbangi posisi Amerika Serikat. Sampai pada 2013, anggaran militer Tiongkok telah mencapai \$119.5 miliar (Chase, 2015: 15). Dengan sokongan dana yang sedemikian besar, Tiongkok berhasil mewujudkan Arms Military Build-Up dan meningkatkan kapabilitasnya pada matra darat, laut, udara, dan C4ISR (Command, Control, Communication, Computer, Intellegence, Surveillance, Reconnaissance).

Di matra darat, Tiongkok mengembangkan tank. Tank tersebut dikembangkan oleh perusahaan Norinco dan diberi nama Tank VT-4. Tank tersebut dikatakan sebagai saingan dari M1A2 Abrams milik Amerika Serikat. Kemudian di matra udara, pesawat tempur yang berhasil dikembangkan Tiongkok adalah Shenyang J-31, Shenyang J-10, dan Shenyang J-11B (CBS News, 6 Agustus 2014). Pesawat tersebut telah menjalani uji coba dan dipertunjukkan di China Airshow pada tahun 2015. Di matra laut, Tiongkok mengembangkan kapal induk yang secara fungsi akan digunakan sebagai pengangkut pesawat-pesawat tempur Tiongkok (Aircraft Carrier). Kapal yang dikembangkan bernama Liaoning. Berbeda dengan kapal-kapal buatan negara besar lain yang sudah menggunakan tenaga nuklir, Liaoning masih menggunakan tenaga turbin uap dan mesin diesel. Alutsista yang disebutkan diatas belum mencakup secara keseluruhan.

Arms Military Build-Up yang dilakukan Tiongkok mengundang respon dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik seperti Jepang dan Korea Selatan, bahkan dari negara diluar kawasan Asia Pasifik seperti Amerika Serikat. Jepang merespon Arms Military Build-Up Tiongkok dengan cara mengembangkan teknologi persenjataannya, serta meningkatkan aliansi dengan negara-negara mitra dan negara-negara yang memiliki kekhawatiran yang sama terhadap kebangkitan Tiongkok, salah satunya Amerika Serikat (Grant, 2012: 3). Korea Selatan juga melakukan respon terhadap tindakan Tiongkok. Korea Selatan juga

meningkatkan aliansi dengan Amerika Serikat. Cara yang digunakan Korea Selatan adalah sama dengan yang dilakukan Tiongkok di perbatasan Korea Utara - Tiongkok, yaitu dengan menggelar latihan bersama dengan tentara Amerika Serikat (Revere, 2016: 3). Meskipun tidak secara langsung memberikan dampak terhadap Korea Selatan, dengan pergerakan militer Tiongkok ke wilayah perbatasan Tiongkok - Korea Utara akhirnya memicu respon Korea Selatan. Sedangkan, apa yang dilakukan Amerika Serikat adalah menjadikan Korea Selatan untuk tandem mereka di semenanjung Korea seperti Tiongkok yang menjadikan Korea Utara sebagai proxy (Bennet, 2006: 5). Tindakan saling respon atas pergerakan militer masing-masing negara inilah yang berbahaya bagi stabilitas keamanan di Asia Pasifik.

Berdasarkan penelitian John Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul, "Can China Rise Peacefully?", John Mearsheimer berpendapat bahwa kebangkitan Tiongkok dapat membahayakan bagi negara-negara sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik. Karena semakin kuat suatu negara, maka akan semakin besar pula pengaruhnya. Namun di sisi lain, tidak ada satu negara pun yang dapat menjadi global hegemony, maka dari itu negara akan mengubah fokusnya untuk menjadi regional hegemony. Tidak hanya itu, negara yang kuat juga akan berusaha mencegah negara lainnya untuk menjadi hegemon di regional lain (Mearsheimer, 2004). Melihat hadirnya Tiongkok sebagai kekuatan baru, maka hal ini akan berdampak terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Dampak Arms Military Build-Up Tiongkok Terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara Aliansi Amerika Serikat Di Kawasan Asia Pasifik Periode 2012-2017?

Kerangka Pemikiran

Penulis berusaha menjelaskan kasus ini dengan menggunakan konsep Deterrence, Arms Military Build-Up, dan Action-Reaction Model sebagai landasan. Seluruh teori dan konsep yang digunakan oleh penulis merupakan turunan dari paradigma realisme. Paradigma realisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, dan menjadikan power komponen penting bagi suatu negara demi kelangsungan eksistensi (survival). Power dalam militer dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan dalam peperangan atau alat untuk memberikan ancaman. Namun power bersifat relatif, suatu negara hanya dapat diketahui powernya apabila negara tersebut dibandingkan dengan negara lain.

1. Deterrence

Deterrence merupakan strategi negara untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatannya untuk menangkal serangan dari lawan, atau setidaknya menekan dan memaksa lawan untuk berpikir kembali untuk melakukan serangan. Karena itulah konsep deterrence membutuhkan dua unsur, yaitu penggambaran ancaman yang jelas dan penyampaian ancaman kepada lawan (Huth, 1999: 48). Keberhasilan strategi deterrence dapat dilihat dari perspektif militer ataupun non militer. Dari perspektif militer, deterrence dikatakan berhasil apabila negara yang menjadi target deterrence menarik ancaman yang telah dikeluarkan. Hal ini akan mengarah pada peningkatan hubungan diplomatik dan pembentukan kerjasama antar-pihak (Jentleson, 2015:30). Strategi ini dilakukan bila hasil yang didapatkan setelah perang lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkan (Brodie, 1959:304).

2. *Arms Military Build-Up*

Teori Arms Military Build-Up adalah teori yang menggambarkan proses peningkatan kapabilitas militer oleh suatu negara. Peningkatan kapabilitas militer ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan anggaran pertahanan, pengembangan industri pertahanan, penambahan pasukan, perubahan strategi, dan peningkatan teknologi persenjataan (Mapp, 2014:11). Tindakan peningkatan kapabilitas militer adalah pemicu bagi perlombaan senjata (arms race) dengan negara lain. Teori ini juga menghasilkan satu konsep turunan, yaitu Revolution In Military Affairs (RMA). RMA sendiri secara definitif merujuk pada revolusi (perubahan secara cepat) dalam bidang militer suatu negara. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan secara kuantitas atau kualitas, tapi juga mengubah suatu pola atau cara yang telah dianut lama (Thompson, 2000:72). Suatu revolusi militer dikatakan sebagai RMA apabila terdapat perubahan pada tiga aspek, yaitu teknologi pertahanan, manajemen pertahanan, dan manajemen teknologi (Matthews, 2001:13).

Action-Reaction Model

Action-Reaction Model adalah teori yang menggambarkan bahwa dinamika peningkatan kapabilitas militer suatu negara dipengaruhi oleh faktor eksternal. Action-Reaction Model menyatakan bahwa suatu negara melakukan peningkatan kapabilitas militer karena merasakan potensi ancaman yang diberikan oleh negara lain. Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh suatu negara ini akhirnya juga menimbulkan reaksi dari negara lain (Buzan, 1987:76). Teori ini merupakan perwujudan dari gambaran sistem internasional yang bersifat anarkis. Sistem internasional tersebut menggambarkan bahwa setiap negara berpotensi menjadi ancaman bagi negara lainnya.

3. *Operasionalisasi Teori*

Dalam penelitian ini, Arms Military Build-Up digunakan untuk menggambarkan proses peningkatan kapabilitas militer oleh Tiongkok. Action-Reaction Model digunakan untuk menggambarkan respon atau reaksi dari negara-negara lain atas Arms Military Build-Up. Sedangkan, Deterrence menjadi acuan penulis dalam menggambarkan tujuan Tiongkok serta situasi kawasan Asia Pasifik.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Dimana menurut John W. Cresswell, metode kualitatif adalah model penelitian yang didefinisikan secara longgar, yang menghasilkan data verbal, visual, dalam bentuk narasi deskriptif seperti catatan lapangan, rekaman, atau transkrip lainnya dari rekaman audio dan video dan tulisan lainnya secara jelas (Cresswell, 2003:21). Sedangkan Bruce L. Berg mendefinisikan metode kualitatif sebagai pendekatan untuk mencari jawaban dalam meneliti fenomena sosial dan aktor-aktor yang terlibat dengan mengakses data-data yang tidak terkuantifikasi seperti surat, foto, koran, buku harian, dan lain sebagainya (L. Berg, 2001:7).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penulisan ini penulis berusaha menjawab pertanyaan "Bagaimana" yang bertujuan untuk menggambarkan variabel-variabel penelitian. Penulis juga mencoba menganalisa hubungan antar variabel tersebut sehingga hasilnya dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan secara deskriptif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap literatur-literatur yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang berkaitan dengan isu yang diteliti dalam penulisan ini. Penulis menggunakan teknik analisa data dalam penelitian ini berdasarkan metode dan data-data (data sekunder) yang digunakan dalam penelitian ini. Berangkat dari gambaran yang telah dijabarkan diatas, pertanyaan penelitian yang berusaha dijawab oleh penulis adalah: Bagaimana Dampak Arms Military Build-Up Tiongkok Terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara Aliansi Amerika Serikat Di Kawasan Asia Pasifik Periode 2012-2017?

Pembahasan

Arms Military Build-Up Tiongkok didorong oleh empat faktor utama, antara lain;

- a. Pertumbuhan Ekonomi, ini merupakan hasil dari liberalisasi ekonomi yang dilakukan padatahun 1980. Saat ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai angka 9.6%. Hal ini mendorong naiknya anggaran pertahanan, saat ini anggaran pertahanan Tiongkok mendapat porsi 2.1% dari APBN Tiongkok, meningkat dari jumlah sebelumnya yang hanya 1.3% (SIPRI, 2016),
- b. Pengamanan jalur perdagangan, sejak awal masa jabatannya, Xi Jinping mencetuskan konsep OBOR (One Belt One Road). Rencana ini merupakan langkah Tiongkok untuk pembangunan jalur sutera baru demi meningkatkan konektivitas negara-negara Eurasia. Jalur dari OBOR ini tidak hanya berfokus pada jalur darat namun juga difokuskan untuk jalur perdagangan laut. Karena itulah militer Tiongkok dibutuhkan untuk pengamanan jalur perdagangan (Pearson, 2017),
- c. Hubungan Tiongkok dengan Negara-Negara di Kawasan, faktor ini merupakan faktor penting mengingat Tiongkok dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terlibat konflik di masa lalu. Hal itulah yang menyebabkan tidak adanya political trust antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik sehingga bukan merupakan sesuatu yang baru apabila negara-negara Asia Pasifik saling berlomba memperkuat kaapbilitas militernya (Buzan, 1993),
- d. Kehadiran Aktor Eksternal, aktor eksternal yang dimaksud adalah Amerika Serikat dimana Amerika Serikat mulai masuk dan melancarkan pengaruhnya pada masa Perang Dunia II. Amerika Serikat berhasil menjadikan Jepang dan Korea Selatan sebagai mitra strategis mereka di kawasan Asia Pasifik, kemudian disusul dengan Taiwan yang mereka jadikan sebagai salah satu importir senjata terbesar di Asia Pasifik (US DoD, 2013).

Arms Military Build-Up Tiongkok sendiri dilakukan meliputi keseluruhan aspek militer mulai dari perubahan doktrin pertahanan, peningkatan kualitas personil di semua matra, kuantitas dan kualitas persenjataan, hingga aspek-aspek lainnya seperti alokasi anggaran yang tepat dan pemberisihan korupsi di tubuh institusi militer. Berkaitan dengan doktrin pertahanan, Tiongkok tidak mengubah doktrin pertahanannya, yaitu *defense in nature*. Bagian yang mengalami perubahan adalah strateginya yang berubah menjadi *defense active* (Kementerian Pertahanan Tiongkok, 2015). Tiongkok juga mengalami peningkatan dalam pertahanan maritimnya selain dari kuantitas dan kualitas persenjataan, kini jangkauan daerah operasi yang semula berada di tingkat *green water navy* menjadi *blue water navy*. Saat ini Tiongkok telah menempati urutan keempat dalam hirarki kapabilitas maritim blue

water navy menurut sistem klasifikasi Todd dan Lindberg (Kircherberg, 2015). Diprediksikan Tiongkok akan terus mengalami peningkatan mengingat modernisasi persenjataan masih dilakukan hingga tahun 2025.

	Rank	Proyeksi	Kapabilitas	Negara
Blue-water	1	Power dengan lingkup global	Pengerahan power secara berkelanjutan di level global	Amerika Serikat
	2	Power global secara terbatas	Setidaknya ada satu pasukan yang dapat beroperasi secara global	Perancis, Inggris
	3	Power multi-regional	Pengerahan power ke luar kawasan yang berdekatan dengannya	India, Italia, Rusia, Spanyol, Brazil
	4	Power regional	Pengerahan power dalam lingkup terbatas diluar ZEE	Tiongkok, Jepang, Australia, Korea Selatan, Jerman

Tabel 1: Klasifikasi Kekuatan Maritim level Blue Water Navy menurut Todd dan Lindberg
Sumber : Jurnal Springer

Langkah selanjutnya adalah dengan mengembangkan industri pertahanan. Diimplementasikan dengan cara peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan (Litbang) dari pemerintah Tiongkok. Sebanyak 12-20% anggaran militer Tiongkok dialokasikan untuk sektor penelitian dan pengembangan persenjataan selama 20 tahun terakhir (Cheung, 2013). Jumlah alokasi anggaran ini melebihi Amerika Serikat yang hanya mengalokasikan 10% anggaran militernya untuk kepentingan litbang. Tujuannya adalah agar Tiongkok mampu mempersempit gap dan menyusul teknologi persenjataan negara-negara besar di dunia. Pengembangan industri pertahanan dilaksanakan dengan peningkatan kualitas SDM, yaitu dengan mengirimkan pelajar Tiongkok ke luar negeri. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan kontribusi sipil (non-militer) dalam pertahanan Tiongkok serta untuk mempererat kemitraan strategis dengan negara-negara besar dan memperkecil potensi terjadinya security dilemma (Kementerian Pendidikan Tiongkok, 2017).

Langkah ini terbilang berhasil mengingat Tiongkok menurut statistik saat ini menempati posisi ketiga sebagai negara eksportir senjata terbesar di dunia. Ranking Tiongkok saat ini menyalipl negara-negara mayor Uni Eropa yaitu Perancis, Jerman, dan Inggris (SIPRI, 2017). Kemudian, Arms Military Build-Up di bidang personil yang dilakukan Tiongkok meliputi pengorganisasian pasukan, pendanaan, edukasi, dan pelatihan pasukan. Pada bagian pendanaan pasukan, pemerintah Tiongkok mendorong tentaranya untuk menjalankan bisnis, seperti pertanian, peternakan, pabrik, bank, bahkan klub malam. Keuntungan dari bisnis tersebut digunakan untuk anggaran militer Tiongkok (Blair, 2007). Pada alutsistanya, Tiongkok meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan di seluruh matra dan difokuskan pada matra laut (maritim). Hal ini dikarenakan negara-negara tetangga Tiongkok merupakan negara-negara kepulauan dan konflik atau sengketa yang melibatkan Tiongkok banyak terjadi di matra laut. Selain itu hal ini juga berkaitan dengan

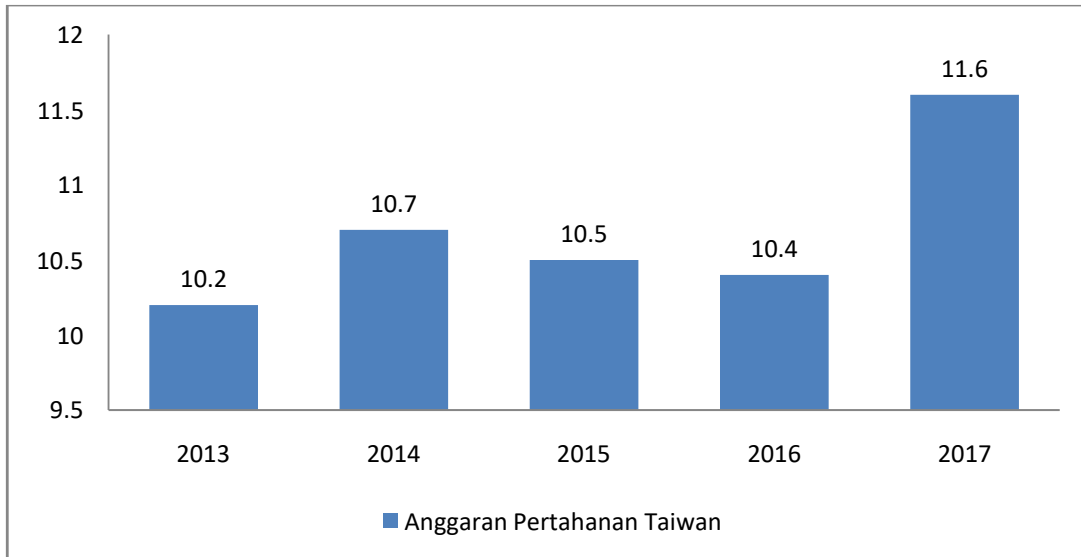
pembangunan jalur sutera baru yang juga berfokus pada jalur laut.

Arms Military Build-Up yang dilakukan Tiongkok sepanjang 2012-2017 mengundang reaksi dari negara-negara lainnya yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, bahkan Amerika Serikat. Sebagai bentuk respon atas Arms Military Build-Up Tiongkok, Jepang mengusung 'Strategi Tiga Cabang'. Poin-poin yang terdapat dalam 'Strategi Tiga Cabang' Jepang antara lain;

- a. Arms Military Build-Up Jepang, poin ini berisikan tentang langkah-langkah Jepang untuk melakukan peningkatan di sektor pertahanan. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan anggaran pertahanan, revisi pakta San Fransisco, dan modernisasi persenjataan. Modernisasi dilakukan dengan membeli senjata dari AS dan memproduksi secara mandiri.
- b. Peningkatan aliansi dengan Amerika Serikat, poin ini berisikan langkah Jepang untuk membangun dan mempererat aliansi dengan Amerika Serikat demi menghalau kekuatan Tiongkok di Asia Pasifik. Implementasinya dengan cara peningkatan frekuensi latihan gabungan dan pembangunan infrastruktur pertahanan untuk pasukan kedua negara.
- c. Pembentukan aliansi multilateral, poin ini berisikan langkah Jepang untuk membentuk aliansi multilateral dengan menggandeng negara-negara diluar Asia Timur seperti India dan Australia (Kementerian Pertahanan Jepang, 2017).

Seperti halnya Jepang, Korea Selatan turut melakukan peningkatan pertahanan dengan pembangunan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). THAAD adalah sistem pertahanan anti misil yang dimiliki Korea Selatan dan merupakan alutsista yang diproduksi oleh Amerika Serikat lewat perusahaan Lockheed Martin. Korea Selatan menyatakan bahwa THAAD merupakan alutsista yang digunakan untuk mengimbangi kekuatan misil Korea Utara sebagai ancaman utama bagi Korea Selatan. Namun, Tiongkok mempersepsikan pengembangan THAAD tersebut sebagai ancaman, hal itu dikarenakan jangkauan radar misil THAAD mencapai teritori Tiongkok. Tiongkok merespon tindakan Korea Selatan ini dengan menutup beberapa perusahaan Korea Selatan di Tiongkok (ISDP, 2017).

Senada dengan negara-negara lainnya, Taiwan turut melakukan peningkatan kapabilitas pertahanan sebagai respon terhadap agresivitas Tiongkok di kawasan. Peningkatan kapabilitas tersebut dilakukan dengan meningkatkan anggaran pertahanan dan pembelian senjata dari Amerika Serikat. Peningkatan anggaran yang dilakukan Taiwan terbilang masif mengingat persentase anggaran pertahanannya mencapai 2-3% dari keseluruhan GDP Tiongkok. Selain itu dikabarkan bahwa Taiwan saat ini sedang merancang proyek pengembangan senjata nuklir sebagai bentuk tindakan deterrence terhadap Tiongkok diSelat Taiwan (Departemen Pertahanan Taiwan, 2017).



Gambar 1: Grafik Anggaran Pertahanan Taiwan 2013-2017

Sumber : Buku Putih Pertahanan Taiwan

Namun, terlepas dari berbagai reaksi keras yang ditimbulkan atas Arms-Military Build Up Tiongkok, terdapat beberapa temuan yang menjadi sorotan penulis. Poin pertama adalah dimana negara-negara Asia Pasifik, khususnya Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan merupakan mitra dagang terbesar bagi Tiongkok, sehingga kecil kemungkinannya untuk terjadi konflik mengingat akan timbul kerugian yang sangat besar bagi semua pihak.

Hubungan dagang yang baik tersebut dibuktikan dengan statistik tahun 2012-2016 dimana Jepang dan Korea Selatan masuk ke dalam 10 besar negara mitra dagang terbesar Tiongkok, Taiwan sendiri menempati posisi ke-11 (Bank Dunia, 2016). Merujuk pada rekam historis, ekonomi adalah satu-satunya sektor yang digunakan oleh negara-negara Asia Pasifik dalam melakukan normalisasi hubungan setelah konflik yang melanda satu sama lain selama puluhan tahun. Di sisi lain, berdasarkan perspektif realisme yang menyatakan bahwa negara merupakan aktor rasional, negara-negara Asia Pasifik tidak akan memulai konflik dengan Tiongkok mengingat kekuatan militer Tiongkok begitu besar saat ini.

Ekspor			Impor		
Negara	Jumlah (Miliar US\$)	Persentase	Negara	Jumlah (Miliar US\$)	Persentase
Amerika Serikat	385,678	18.39	Korea Selatan	157,975	10.01
Hong Kong	287,251	13.69	Jepang	145,671	9.17
Jepang	129,268	6.16	Negara Asia Lain	138,847	8.47
Korea Selatan	93,707	4.47	Amerika Serikat	135,130	8.51
Jerman	65,214	3.11	Tidak Teridentifikasi	129,008	8.31

			si		
--	--	--	----	--	--

Tabel 2 : Ranking Mitra Perdagangan Tiongkok 2012-2016

Sumber: World Bank

Poin kedua adalah bahwa negara-negara Asia Timur/Pasifik merupakan pasar senjata terbesar kedua bagi Amerika Serikat. Penulis menilai bahwa Amerika Serikat memanfaatkan situasi dimana Tiongkok melakukan Arms Military Build-Up untuk mendorong penjualan senjatanya dan mendapatkan profit. Terbukti dari catatan pembelian senjata yang dilakukan negara-negara Asia Pasifik yang menunjukkan bahwa semuanya membeli dari Amerika Serikat (SIPRI, 2016).



Gambar 2 : Volume dan Tujuan Ekspor Senjata Amerika Serikat 2012-2016.

Sumber : SIPRI

Poin ketiga adalah mengenai status kedaulatan Taiwan. Hingga hari ini, status Taiwan sebagai negara berdaulat masih menjadi perdebatan. Banyak aktor yang mengakui bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok, pengakuan tersebut didukung oleh One China Policy yang memasukkan Taiwan sebagai provinsi dari Tiongkok meskipun Taiwan sendiri menganggap bahwa mereka merupakan satu negara berdaulat. Bahkan Amerika Serikat sendiri yang dianggap sebagai induk aliansi bagi negara-negara Asia Pasifik menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Dengan status kedaulatan Taiwan saat ini, maka Amerika Serikat secara tidak langsung terlepas dari tanggung jawabnya sebagai induk aliansi apabila terjadi konflik (Heritage, 2008). Poin terakhir adalah bahwa Tiongkok merupakan negara terbesar yang memberikan pinjaman luar negeri kepada Amerika Serikat. Sejak 2012, Tiongkok menggantikan posisi Jepang sebagai negara yang menyediakan surat hutang bagi Amerika Serikat dan hal tersebut berlangsung hingga kini (US Treasury, 2017).

Penulis memandang bahwa dengan ataupun tanpa Arms Military Build-Up Tiongkok, kawasan Asia Timur/Pasifik merupakan kawasan yang 'panas' dan tidak ada stabilitas disana. Hal itu disebabkan karena faktor historis dimana semua negara di Asia Timur/Pasifik terlibat konflik di masa lalu sehingga tidak ada political trust diantara mereka. Meskipun dikatakan berhasil melakukan normalisasi melalui kerjasama ekonomi, namun hubungan politik negara-negara Asia Pasifik tidak mengalami perubahan, hubungan negara-negara tersebut digambarkan dengan ungkapan hot economy cold politics. Kemudian, panasnya situasi

kawasan dimanfaatkan Amerika Serikat untuk melakukan penetrasi pasar industri pertahanan dimana hal tersebut terbukti berhasil.

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan penggunaan data primer dan sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Arms Military Build-Up, Deterrence, dan Action-Reaction Model sebagai kerangka pemikiran. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan Arms Military Build-Up Tiongkok menimbulkan reaksi keras dari negara-negara tetangga Tiongkok yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Respon dari negara-negara terkait atas Arms Military Build-Up Tiongkok merupakan tindakan serupa dimana negara-negara tersebut melakukan peningkatan kapabilitas militer sebagai antisipasi ancaman Tiongkok. Hal inilah yang memicu terjadinya instabilitas kawasan Asia Timur/Pasifik.

Namun penulis menganggap bahwa instabilitas kawasan Asia Timur tetap terjadi dengan atau tanpa peningkatan kapabilitas militer Tiongkok mengingat catatan historis menunjukkan bahwa kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang konfliktual. Terlepas dari instabilitas kawasan, penulis menyimpulkan bahwa perang tidak akan terjadi karena hubungan ekonomi negara-negara Asia Pasifik begitu erat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi semua pihak. Kemudian, penulis menganggap bahwa panasnya situasi di kawasan Asia Pasifik dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sebagai induk aliansi negara-negara Asia Pasifik untuk mendorong penjualan produk industri pertahanan mereka. Selain itu, Amerika Serikat saat ini merupakan negara penerima pinjaman luarnegeri terbesar dari Tiongkok sehingga meskipun di permukaan terlihat adanya rivalitas antara kedua negara, namun sesungguhnya terdapat hubungan erat diantara mereka.

Referensi

- Bennet, Bruce. (2006). *A Brief Analysis of Republic of Korea Reform Plan*. Santa Monica: RAND Publications.
- Berg, Bruce L. (2001). *Qualitative Research Methods for The Social Science*. Needham Heights: Pearson Education Company.
- Blair, Dennis. (2007). "China's Military Modernization on Land and Sea and in the Air andSpace: Relevance to US Policy." Dickinson College: 4.
- Brodie, Bernard. (1959). *The Anatomy of Deterrence: Stategy in Missile Age*. Princeton: Princeton University Press.
- Buzan, Barry. (1987). "An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations." *International Institute of Strategic Studies*: 76.
- Buzan, Barry. (1994). "Rethinking East Asian Security." *Institute of Defence and SecurityStudies*: 8.
- Chapman, Gary. (2003). "An Introduction to Revolution in Military Affairs." *LBJ School of Public Affairs*: 2.
- Chase, Michael S. (2015). *China Incomplete Military Transformation: Assessing the Weaknesses of the People's Liberation Army (PLA)*. California: RAND Corporation.
- Cheung, Tai Ming. (2014). "The Current State of Defense Innovation in China and Future Prospects." *University of California Institute on Global Conflict and Cooperation*: 1.
- Cresswell, John W. (2003). *Research Design Qualitative, Quantitative. and Mixed Methods Approaches Second Edition*. California: Sage Publications, Inc.
- Departemen Pertahanan Amerika Serikat. (2017). *Keamanan dan Perkembangan Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok. Laporan Tahunan Kepada Kongres 2017*.
- Grant, Charles. (2012). "Japan's Response to China's Rise." *Centre for European Reform*: 3.
- Jentleson, B.A. (2005). *Who Won Libya?. Whystock: International Security Press*.

- Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok. (2017). Jumlah Pelajar Tiongkok di Luar Negeri.
- Kementerian Pertahanan Jepang. (2016). Pertahanan Jepang 2015.
- Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok. (2016). Kebijakan Pertahanan Nasional.
- Kirchberger, Sarah. (2015). "Assessing China's Naval Power: Technological Innovation, Economic Constraints, and Strategic Implications." Springer: 60.
- Lembaga Kerjasama Keamanan Amerika Serikat. (2017). Laporan Perwakilan Bidang Ekonomidan Kebudayaan Taipei.
- Mapp, Wayne. (2014). Military Modernization and Build Up In Asia Pacific. Singapura: RSIS Press.
- Matthews, Ron. (2001). Managing The Revolution In Military Affairs. New York: PALGRAVE.
- Mearsheimer, John J. (2004). Why China Rise Will Not Be Peaceful?" University of Chicago Press: 54.
- Pearson, Christopher J. (2017). "String Of Pearls: Meeting The Challenge Of China's Rising Power Across The Asian Littoral." Strategic Studies Institute: 721.
- Revere, Evans. (2016). "The U.S – ROK Alliance: Projecting U.S Power and Preserving Stability in Northeast Asia." Asian Alliances Working Paper Series 3: 3.
- SIPRI. (2016). "SIPRI Military Expenditure Database 1950-2016".
- SIPRI. (2017). "International Transfers of Major Weapons 2012-2016." SIPRI.
- The U.S Treasury, (2017), Major US Treasury Holders, <http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt>, diakses pada 29 Desember 2017
- Thompson, Michael J. (2000). "Military Revolutions and Revolutions in Military Affairs: Accurate Descriptions of Change or Intellectual Constructs?." Queen University Press: 72.
- World Bank. (2017). "China Trade Data". <https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/CHN>, diakses pada 29 Desember 2017.